

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di sebuah daerah dapat dikatakan optimal atau mencapai keberhasilan jika suatu daerah tersebut mampu dikelola oleh pemangku kepentingan yang tepat, yaitu dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan SDA yang ada serta potensi yang ada di daerah tersebut, sumber daya tersebut dapat berupa alam, manusia atau kemajuan teknologinya. Salah satu perwujudan dari pembangunan nasional adalah membangun daerah itu sendiri, atau pembangunan Daerah yang memiliki tujuan untuk menyamaratakan atau menyelaraskan Potensi di setiap daerah agar tidak ada kesenjangan, dalam hal ini di daerah Desa memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan daerah.

Dalam hal pembangunan Daerah, Desa mempunyai peran yang lumayan besar dalam hal ini yaitu seperti pengelolaan sumber daya daerah yang dimiliki harus ada kerja sama antar masyarakat desa dan juga harus ada pemberdayaan masyarakat secara tepat, salah satu hal sekarang ini yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan suatu daerah khususnya desa untuk pembangunan nasional adalah melalui Desa wisata atau pariwisata, Pengembangan industri Pariwisata adalah hal pokok saat ini untuk Pengembangan

pembangunan , pengembangan pariwisata Ini merupakan konsep dari pengembangan pariwisata Berkelanjutan. Pengembangan pariwisata Keberlanjutan adalah pembangunan dengan mengedepankan minat Turis dan partisipasi langsung Komunitas lokal atau masyarakat itu sendiri, guna menstabilkan manajemen pariwisata untuk lebih jauh atau jangka panjang .

pengertian diatas digunakan Untuk memuaskan perekonomian dan estetika masyarakat ,dan juga bermanfaat mempertahankan integritas dan keanekaragaman ekologi Kehidupan, budaya dan sistem kehidupan. pengembangan pariwisata Juga digunakan sebagai pengelolaan sumberdaya alam yang ada didaerah . dengan demikian diperlukan Partisipasi antar departemen, termasuk pemerintah, Publik dan swasta Manajemen Pariwisata. paradigma pembangunan di mana pemerintah tidak lagi merupakan satu-satunya pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan mempengaruhi pengelolaan desa, peran dan kerjasama aktor dalam membentuk suatu Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata antar masyarakat dan pemerintahan desa wisata, Pemkot Rembang melibatkan berbagai pihak ,yaitu swasta, akademisi, dan juga media ,dan mendapatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan atau pemberdayaan . Adapun eksekusi Tata kelola kolaboratif membutuhkan komunikasi yang efektif untuk mempromosikan Peserta berkolaborasi sehingga dapat optimal perannya dalam pembangunan Desa wisata.

Industri pariwisata Indonesia adalah Perjalanan dari orang-orang,yang di cetuskan oleh rakyat dan untuk rakyat. Elemen terpenting sebagai penggerak

Pengembangan pariwisata adalah Pemerintah, bisnis atau Industri dan juga masyarakat (termasuk tokoh masyarakat), tokoh agama, media, lembaga swadaya masyarakat, dan ulama. (Sedarmayanti, 2014). Adapun sebuah kota kecil di Indonesia dengan potensi pariwisata yang unggul dan dengan memunculkan suatu hal yang baru terletak di Kota Rembang, Kec Kajar yang berada di Provinsi Jawa Tengah, meskipun lokasi daerah terbilang sangat kecil dan terpencil, namun Desa wisata Edupark Kajar memberikan warna baru dalam contoh desa wisata yang diharapkan dapat mengedukasi desa wisata lain.

Desa Kajar merupakan salah satu desa di Gunem yang bertempat di kabupaten Rembang, Desa ini terletak di daerah tertinggal seperti ini memiliki daya tarik sendiri untuk dilakukan penelitian, melihat keadaan Desa dan SDA yang dikelola dengan baik, membuat Desa yang terpencil ini dapat sedikit disorot dan mendapat perhatian dari masyarakat luar, bahkan digunakan sebagai contoh pengembangan desa wisata Edupark bagi Desa maupun daerah lain, Di daerah ini terbentuk integrated farming atau (pertanian terpadu) yang besar, dan melibatkan 6 desa lainnya. yaitu kerja sama tiga pihak, dana desa, KUR (Kredit Usaha Rakyat), kemudian PT Semen Gresik dan akan menjadi integrated farming yang besar kedepannya.

Daerah kecamatan Gunem memiliki luas 8.020.341 ha, yang terdiri dari permukiman, lahan usaha, lahan pendidikan, pasar, perkantoran, tempat ibadah,

lapangan olah raga, lahan kesehatan serta jalan umum dan sekitar daerah perumahan difungsikan sebagai area persawahan.

Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang memiliki topografi berupa dataran sedang dan pegunungan. Lalu mempunyai Ketinggian +50m di atas permukaan air laut. 15,8% daerah Gunem adalah area persawahan dan sisanya merupakan area tanah kering. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai buruh tani. Hal itu dikarenakan masyarakat desa memiliki lahan garapan yang sangat sedikit, keterampilan yang kurang serta jiwa wirausaha yang kecil, membuat masyarakat bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Situasi ini juga semakin mempersulit untuk pembinaan terhadap kader petani muda, dan juga membuat usaha kecil, menengah dan mikro sangat kecil. Hal ini juga yang membuat semakin sulitnya ditemukan tenaga kerja untuk menjadi petani, hal ini menjadi pertimbangan serius untuk menjadikan hal itu lebih menarik.

Desa Kajar tergolong masih dalam kategori daerah yang berpenghasilan rendah, hal ini membuat Pemerintah desa Kajar mencari akal untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan sumber daya yang dimiliki berikut merupakan sumber dana desa Kajar yang ditulis dalam Peraturan Desa Kajar Nomor 02 tahun 2020 bahwasanya sumber pendapatan desa Kajar adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa yang diperoleh dari SDA, hasil swadaya dan hasil gotong royong masyarakat.

2. Didapatkan dari pajak Kabupaten yang memang di peruntukan untuk desa secara proposional .

3.dari dana perimbangan pusat yang ditujukan untuk desa dan merupakan alokasi tetap desa.

Keberadaan Edupark ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan pertanian terpadu skala besar yang dapat dilakukan oleh desa-desa di Indonesia. Agar tidak mengganggu siklus ekonomi masyarakat desa, BUMDes harus memilih bisnis inti (usaha utama) yang belum dipilih oleh penduduk setempat. Selain itu, diharapkan Edupark ini akan membantu meningkatkan standar sumber daya manusia penduduknya. Inisiatif ini mengajarkan penduduk setempat bagaimana menghargai flora dan hewan yang selalu ada di sekitar mereka.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa wisata Edupark Kajar ini, pemerintah dan juga PT Semen Gresik Rembang dan 3 elemen lainnya ikut andil serta dalam keberlangsungannya .Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam pertumbuhan resor wisata ini akan mempengaruhi perkembangan daerah yang bersangkutan. Collaborative Governance digunakan dalam hal ini oleh Desa Wisata Edupark untuk mengembangkan industri pariwisatanya. Menurut Jung dkk. (2009), tata kelola kolaboratif adalah tindakan menciptakan, mempromosikan, mendukung, mengoperasionalkan, dan mengawasi struktur organisasi lintas sektoral untuk

mengatasi masalah kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas atau masyarakat umum.

Desa wisata Edupark Kajar ini di gadang-gadang akan menjadi taman wisata edupark yang luas dan berkopeten dalam bidang pertanian dan peternakan yang akan menjadi contoh bagi desa wisata lainnya, karena akan melibatkan 6 desa di daerah sekitar Kajar dan akan menjadi model integrated farming yang berskala besar, hal ini didukung dengan keadaan geografis di desa Kajar yang berpotensi digunakan untuk pengelolaan pertanian dan peternakan .

Hal inilah yang menjadi focus penelitiannya, yaitu karena Desa wisata Edupark Kajar ini merupakan inovasi collaborative governance yang baru dan akan menjadikan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat terjalin lebih harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Collaborative Governance dalam penciptaan dan pengelolaan desa wisata Edupark Kajar?” berdasarkan latar belakang di atas.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui implementasi Governance dalam melakukan kerja sama terhadap pembangunan Desa wisata Edupark Kajar”

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 . Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengkajian mengenai Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata Edupark, dan menambah wawasan mengenai ilmu politik .

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pemerintahan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah untuk gambaran informasi mengenai Collaborative Governance membangun desa wisata,terkait dengan BUMDes yang ada di Desa maupun Daerah lainnya.
2. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi di penelitian berikutnya terkait dengan tema yang sama .

3. Bagi Masyarakat umum hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai Collaborative Governance dan hasil dari pengelolaan Desa wisata dan mengetahui apakah BUMDesnya berjalan secara benar menurut fungsinya .

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut ini akan uraian beberapa literature review yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Latar belakang masalah dalam penelitian ini tidak diragukan lagi dibahas dalam tinjauan literatur seperti yang disediakan. Berikut ini adalah beberapa contoh literature review yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

N o	Nama	Judul penelitian	Tahu n	Temuan
1.	Nur Mahya Maulidia	“Diskontunitas kota kreatif pekalongan dalam prespektif kolaboratif Governance	2020	Temuan hasil penelitian ini adalah proses mewujudkan kolaborasi kota Alasan mengapa Pekalongan tidak tampil sebagai pusat budaya

				<p>karena prosesnya rumit. para aktor dari kota seni Pekalongan tidak berjalan dengan baik. Hegemoni pemerintah menghalangi terlaksananya sejumlah program yang diajukan pihak lain.</p>
2.	Iman Surya dan Sanny nofrima	<p>COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS: WISATA KEBUN TEH NGLINGGO</p>	2021	<p>Kebun Teh Nglingga Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dengan tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata sehingga juga meningkatkan</p>

				pendapatan masyarakat.
3.	A.A. Gede Oka Wisnumurti dan dewi larinta tantika	Collaborative Governance: Model Pengembangan Ekowisata di Desa Siangan	2021	<p>Pengelolaan Desa Ekowisata Spiritual di Desa Siangan dilakukan dengan strategi kemitraan (collaborative governance) yakni Kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pihak akademisi. PKM ini merekomendasikan dua hal penting yaitu:</p> <p>(1) kepada pihak pemerintah daerah (Kabupaten Gianyar) perlu memberikan bantuan infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Desa</p>

				Siangan sebagai Desa Ekowisata Spiritual yang menarik, (2) kepada pihak otorita pengelola desa.
4.	Amandha Parameshwari, Dinda Okta Mevia Fajrina dan, Erdo Amsyah	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN TATA RUANG DI CAFE SAWAH PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG	2020	beberapa Instansi dan Pihak yang terlibat dalam manajemen penataan ruang di Café Sawah Pujonkidul. Setiap instansi memiliki peran dan bentuk partisipasi masingmasing. Salah satunya berperan untuk pengembangan desa wisata demi mendukung Visi Misi Kepala Desa. Keberadaan Café Sawah memberikan

				dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat karena mampu mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di Desa Pujonkidul
5.	Cintantya Andhita Dara Kirana dan Rike Anggun Artisa	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu	2020	pengembangan desa wisata, Pemerintah Kota Batu melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Adapun dalam pelaksanaan collaborative governance tersebut, dibutuhkan

				komunikasi yang efektif guna memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata.
6.	Putu Nomy Yasintha	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR	2020	pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar masih hanya mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak swasta masih minimal. Selain itu belum terdapat aturan yang jelas dari pihak desa adat sehingga masyarakat belum mempunyai peran yang

				<p> jelas dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar. </p>
7.	<p> Matthoriq, Soesilo Zauhar dan, Romy Hermawan </p>	<p> Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi PariwisataDesa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu) </p>	2020	<p> Temuannya adalah Pendekatan collaborative governance dapat digunakan sebagai alternatif solusi, khususnya dalam membangun tata kelola pariwisata desa di Kota Wisata Batu yang kolaboratif guna memperkuat karakter destinasi wisata sekaligus bangunan network pariwisata. </p>

8.	Mahfudz	<p>“Desain dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya</p>	2021	<p>Pada penelitian ini ditemukan adanya faktor unik yang mendukung berjalannya collaborative governance, yaitu faktor figur pimpinan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk facilitative leadership/kepemimpinan fasilitatif.</p>
9.	Fuad Amsyari	<p>Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Religi Di Makam Sunan Ampel Kota Surabaya</p>	2018	<p>Temuan dari peneloitian ini yaitu meningkatnya banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata religi Sunan Ampel</p>

10	<p>Hidrawati, Sumiman Udu , Abdul Manan , Sariamin Sahari dan Samsul Alam Fyka</p>	<p>“STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS DI PERKAMPUNGAN WISATA SOUSU, KABUPATEN WAKATOBI</p>	2016	<p>Perkampungan wisata ini belum banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, tetapi wisatawan nasional dan lokal lebih kurang 200 orang per minggu yang masuk ke lokasi ini. Masyarakat setempat belum memperoleh keuntungan yang optimal dari kehadiran wisatawan tersebut. Saat ini masyarakat masih memiliki pendapatan dengan rata-rata Rp 1.200.000,-,-per bulan yang umumnya</p>
----	--	--	------	--

				diperoleh dari sektor nonpariwisata.
11	Andi Nur Qalby	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR (BANK SAMPAH PUSAT)	2018	Inovasi Bank Sampah Pusat merupakan sebuah program yang diluncurkan pemerintah kota Makassar dengan maksud pengelolaan sampah dengan melakukan kolaborasi bersama dengan swasta dan masyarakat. Analogi Bank Sampah Pusat adalah untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berguna untuk pengelolaan

				sampah dengan cara berkolaborasi.
12	Firda Catur Utami, Dedeh Maryani dan Ali Hanaoah Muhi,	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU	2021	ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir

				kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.
13	Iwan Henri Kusnad	Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Komunikasi, Informasi dan Pendidikan (KIE) dalam Pencegahan HIV / AIDS di Kabupaten Subang belum sesuai dengan teori Anshell dan Gash. Terbukti dari aspek Dialog Tatap Muka, belum sepenuhnya tercapai atau dibangun

				yang merupakan jantung dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan komitmen terhadap proses atau elemen-elemen penting dalam langkah awal Kolaboratif Pemerintahan
14	Rasid Pora dan Asrul Sani Habib tahun	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN FESTIVAL TELUK JAILOLO SEBAGAI WISATA BUDAYA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT	2018	Temuan penelitian ini adalah pemerintah daerah sebagai pendamping dan penggerak kegiatan Festival Teluk Jailolo memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan sosialisasi dan

				membangun koordinasi dengan beberapa stakeholder baik pada level pemerintah pusat, pihak swasta hingga masyarakat.
15	Erny Rosyanti, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo dan, Riza Awal Novanto	“COLLABORATIVE GOVERNANCESEBA GAI UPAYA DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA(STUDI ANALISISDESA PACUL KABUPATEN TEGAL	2019	. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pacul dalam melakukan pembangunan selalu bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan model partisipatif.

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa kinerja melalui Collaborative governance tidak selalu

berjalan seperti yang diharapkan ,dengan digunakan beberapa metode penelitian yang ada jelas terlihat masih banyak gap antara pemerintah ,swasta dan masyarakat dalam membangun sesuatu progam secara bersama.namun penelitian terdahulu diatas tetap memiliki kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikan ,semuanya membahas tentang kinerja atau cara kerja mengenai Collaborative Governance ,yang membedakan adalah penggunaan teorinya,beberapa menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi. Serta pada penelitian kali ini focus lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Rembang. Adapun terkait dengan penelitian diatas, penulis melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya dengan melakukan kebaruan terkait Collaborative Governance Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Desa Wisata Edupark Kajar Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021

1.6 Kerangka Teoritik

Kerangak dasar teori adalah merupakan sekelompok ide, penjelasan, klaim, dan variabel yang terhubung secara logis dan berbagi landasan untuk menjelaskan dan meramalkan kejadian "aktual" tertentu. (Emory Coper).

1.6.1 Governance

Sebelum jauh membahas tentang Collaborativ Governance ,sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian tentang Governance itu sendiri karena pengertian dari governance menjadi dasar konsep untuk collaborative governance ,hal ini dilakukan agar tidak ada salah pemahaman antara pembaca dan penulis ,dalam ilmu politik sendiri insitiah Governance dan

Government akan selalu muncul ,keduanya dianggap sama bagi sebagian orang , namun pada dasarnya keduanya sangat berbeda .

Kata "*govern*", yang berarti pemangku kepentingan utama, adalah asal mula konsep governance. Collins mendefinisikan governance sebagai prosedur, pendekatan, atau sistem yang digunakan oleh suatu pemerintahan. Konsekuensinya, governance merupakan proses pengambilan keputusan yang menentukan apakah keputusan akan dilaksanakan atau tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah (government) adalah suatu organisasi atau perorangan yang bertujuan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan (governance). Presiden, bupati, dan kepala setiap kota adalah beberapa contoh pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah kumpulan prosedur, undang-undang, peraturan, norma budaya, dan lembaga yang digunakan untuk mengelola sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

1.6.2 Collaborative Governance

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) adalah bentuk pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. pilihan kelompok formal yang dibuat untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik, mengelola proyek atau aset publik, dan lain sebagainya . CG tidak terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah Dan non-pemerintah, tetapi juga tata kelola multi-mitra, termasuk

sektor swasta, sosial Masyarakat madani dan berdasarkan sinergi peran pemangku kepentingan dan perencanaan Campuran kerjasama sosial publik-swasta dan swasta (Agrawal dan Lemos 2007).

Collaborasi adalah tentang perubahan dalam lingkungan kebijakan. Transformasi ini dapat semakin banyak jika semakin banyak isu yang sulit dideteksi, masalah yang terus eluas dan sulit ditemukan, kapasitas pemerintah terbatas, dan lembaga non-pemerintah meningkat dan pemikiran publik Semakin kritis. Ketika transisi ini terjadi, pemerintah harus cepat tanggap dan mengambil Langkah, menyelesaikannya atau mengatasi apa yang masalah apa yang terjadi. Tapi pemerintah masih juga perlu penyesuaian diri agar relevan dan diterima di oleh lingkungan sekitarnya.

Meskipun tata kelola kolaboratif sekarang mungkin memiliki manajemen yang modern, karakter tidak rapi dari literatur tentang kolaborasi mencerminkan cara itu telah menggelegak dari banyak eksperimen lokal, seringkali sebagai reaksi terhadap kegagalan pemerintahan sebelumnya. Sebagai reaksi terhadap masalah implementasi , biaya yang berlebihan, dan politisasi regulasi, tata kelola kolaboratif berkembang. Hal ini diciptakan sebagai alternatif untuk kekurangan akuntabilitas manajerial dan antagonisme pluralisme kelompok kepentingan (terutama karena otoritas para ahli ditantang). Secara positif, dapat dikatakan bahwa peningkatan kemampuan dan pengetahuan institusional juga berkontribusi terhadap kecenderungan kolaborasi. Kebutuhan akan kolaborasi tumbuh ketika infrastruktur kelembagaan menjadi lebih rumit dan saling berhubungan dan pengetahuan menjadi lebih terspesialisasi dan disebarluaskan.

Menurut Gray (1989), semua variabel ini dapat diukur dengan meningkatnya "turbulensi" yang harus dihadapi oleh para manajer dan pembuat kebijakan.

Adapun beberapa teori mengenai Collaborative Governance yaitu sebagai berikut :

1. Teori governance

Paradigma pemerintahan telah berubah melalui berbagai tahapan. Ada empat tahapan evolusi paradigma dalam administrasi publik, yaitu paradigma Administrasi Publik Tradisional, Manajemen Publik, Manajemen Publik Baru, dan Tata Kelola, menurut Chemma dalam Keban (2014: 37).

a) Administrasi publik tradisional, yang menitikberatkan pada profesionalisme, legalitas, imparialitas, konsistensi, dan hierarki.

b) Manajemen publik, yang menekankan pada konsep manajemen yang meliputi efektivitas, fokus pelanggan, efisiensi sumber daya, orientasi pasar, dan peningkatan kepekaan terhadap kepentingan publik. Paradigma ini juga merekomendasikan sektor publik yang lebih kecil, peran yang lebih kecil untuk administrasi publik tradisional, dan peran yang lebih besar untuk sektor swasta.

c) Gerakan New Public Management yang menitikberatkan pada nilai-nilai adaptabilitas, pemberdayaan, inovasi, dan manajemen yang berorientasi pada hasil dengan tetap mengedepankan etika profesi, penganggaran, dan manajemen berbasis kinerja.

d) Governance, yaitu seperangkat prinsip, aturan, dan institusi yang mengatur bagaimana masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta berinteraksi untuk mengelola masalah ekonomi, sosial, dan politik. Tujuan utama dari paradigma ini adalah untuk meningkatkan interaksi antara ketiga aktor—masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah—dalam rangka memajukan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Paradigma ini menekankan pada sistem dan prosedur yang memungkinkan masyarakat dan kelompok untuk mengekspresikan tujuan mereka, menyelesaikan konflik yang ada, dan menjalankan tugas hukum dan moral mereka. Sementara sektor swasta menawarkan kemungkinan pekerjaan dan pendapatan dan masyarakat mengoordinasikan kontak sosial dan politik yang positif, diyakini bahwa pemerintah akan dapat memainkan perannya dalam membangun keadaan politik dan hukum yang menguntungkan.

2. Collaborative Governance

Dengan adanya collaborative governance ini ,menunjukkan bahwa tugas pemerintahan dalam menjalankan tugas tidaklah mudah ,pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar ,karena pada dasarnya pekerjaan ini sangat rumit dan perlu lebih banyak gagasan dari warga negara, masalah ini lambat laun muncul seiring dengan kedewasaan masyarakat dalam negeri ini. Tapi sebenarnya bukan tidak mungkin untuk mengelola pemerintahan, tapi tetap saja Dapat mengakomodasi layanan, rencana atau kebijakan yang sangat

diinginkan orang. Untuk memutuskan apa yang harus dilakukan atau kebijakan apa yang akan dibuat, pemerintah pada dasarnya harus mendengarkan suara rakyat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan individu dalam proses pembuatan kebijakan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penelitian, yang pada akhirnya kami sebut sebagai tata kelola kolaboratif, menunjukkan bahwa pemerintah berkolaborasi dengan berbagai institusi, individu, dan bahkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik bagi semua orang. Antara pemain, empat bentuk interaksi kolaboratif yang berbeda terwujud (Wanna, 2008).

Pemerintahan Kolektif Jenis struktur pemerintahan ini ada. Intinya, tata kelola kolaboratif adalah kerja sama publik-swasta, klaim Zadek Dalam O'brien (2012: 1). Pragmatisme para peserta telah memicu inisiatif untuk kolaborasi antara entitas negara dan non-negara, komersial dan non-profit. Kolaborasi publik-swasta antara entitas negara dan non-negara, nirlaba dan nirlaba pada dasarnya adalah apa itu pemerintah koperasi, seperti dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan di atas. Jadilah bagian dari pragmatisme. Jenis kolaborasi ini melibatkan beberapa orang yang berkumpul bersama di sekitar sudut pandang atau tujuan yang sama. Akibatnya, dua aspek sistem tata kelola kolaboratif memainkan peran independen.

3. keterlibatan masyarakat

Untuk meningkatkan dampak terhadap kebijakan dan program publik yang memastikan dampaknya berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi mereka, partisipasi warga negara dalam administrasi publik mengacu pada partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan negara melalui tindakan dan/atau pengaturan kelembagaan. (Armstrong, 2013). Kerjasama pemerintah dan warga negara dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. 1. Proses Negosiasi Warga akan dilibatkan dalam menawarkan ide dan memasukkannya ke dalam proses dengar pendapat ketika menetapkan kebijakan pemerintah, tetapi pemerintah tetap akan membuat pilihan akhir. Kedua, kolaborasi antara pemerintah dan rakyat Mereka berkolaborasi sebagai mitra setara untuk memperdebatkan masalah, mencari solusi alternatif, dan kemudian mengambil keputusan.

4. Proses kolaborasi

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai tahap pengembangan. Abu-abu Tiga tahap proses kolaborasi didefinisikan dalam Ansell dan Gash (2007:15), termasuk Pengaturan masalah (menentukan masalah), pengaturan arah (menentukan tujuan), dan melaksanakan. Dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan, kami terjadinya proses kolaboratif tidak teratur dan tidak linier. Sering melihat kerjasama mengandalkan prestasi yang memfokuskan pada tujuan ideal, seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling

pengertian dan hasil. Walaupun proses kolaborasi terjadi pada saat yang tidak teratur namun komunikasi adalah inti dari kerjasama sehingga penulis memulai analisis percakapan tatap muka.

1. Komunikasi tatap muka

Percakapan tatap muka antara peserta adalah dasar dari setiap tata kelola kolaboratif. Ini menawarkan kesempatan bagi setiap aktor untuk menemukan kemungkinan untuk saling menguntungkan karena ini adalah prosedur yang berorientasi pada konsensus. Komunikasi tatap muka adalah metode menghilangkan keraguan di antara peserta dalam kemitraan dan membatasi penemuan awal keuntungan bersama. karena mengelola keunggulan masing-masing pemain bukanlah prioritas di tahap awal melainkan bagaimana menempa konsensus. Membangun kepercayaan, rasa hormat, pengertian, dan komitmen terhadap proses melalui komunikasi tatap muka.

2. Membangun kepercayaan (Trust Building)

Proses kerjasama dimulai dengan membangun kepercayaan antar pemain. Menurut literatur tertentu, pendekatan ini juga berfokus pada komunikasi tatap muka dan pembangunan kepercayaan. Proses saling pengertian di antara para pemangku kepentingan dikenal dengan istilah “membangun kepercayaan”, yang dimanfaatkan untuk menciptakan komitmen untuk melakukan kolaborasi.

3. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*)

Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa contoh kasus mengungkapkan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan iktikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam kolaborasi. Komitmen terhadap proses menjelaskan seberapa bersih, seberapa adil dan transparan suatu prosedur. Terwujudnya komitmen yang positif antar stakeholder bergantung pada kepercayaan akan aktor lain untuk menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses. Kepercayaan memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap aktor memiliki tanggung jawab. Bentuk mandatori dalam bentuk kolaborasi dapat dilaksanakan ketika dorongan untuk berpartisipasi antar aktor bersifat lemah, akan tetapi kolaborasi yang bersifat

mandatori mengindikasikan adanya kelemahan komitmen antar aktor. Tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.

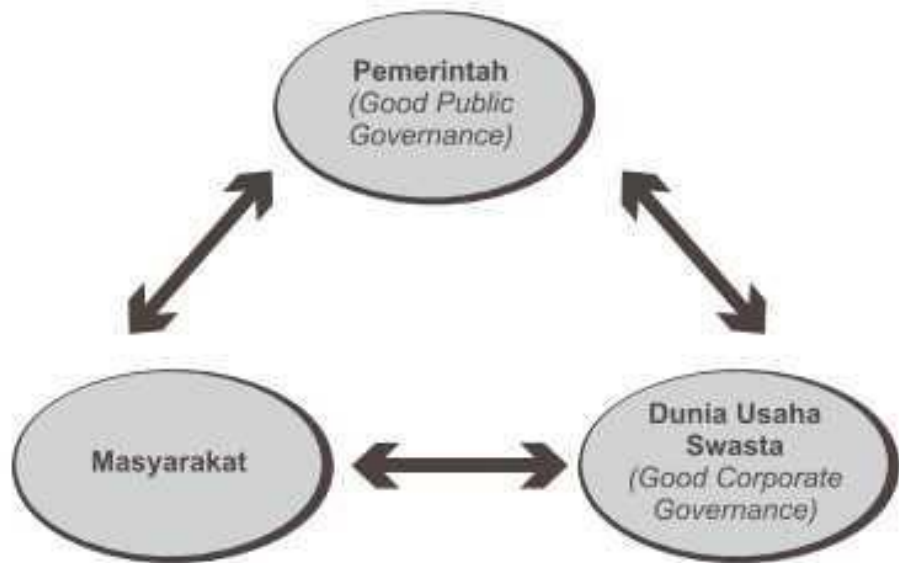
4. Share understanding

Setiap peserta dalam proses kerjasama harus memiliki gagasan tentang apa yang akan dicapai bersama pada beberapa saat. Misi bersama, tujuan bersama, tujuan bersama, kesamaan, visi bersama, filosofi bersama, tujuan yang jelas, arah strategis, dan kejelasan atau keselarasan prinsip dasar adalah istilah yang digunakan dalam berbagai bentuk literasi untuk menggambarkan hal ini. Pemahaman bersama juga dapat merujuk pada kesepakatan tentang bagaimana mendefinisikan suatu masalah.

5. Hasil sementara (*Intermediate Outcomes*)

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa ketika ada peluang kemitraan yang sukses, kolaborasi agak nyata. Meskipun temuan sementara ini akan menunjukkan hasil nyata, proses menuju hasil ini sangat penting untuk menciptakan momentum yang dapat menghasilkan hubungan yang bermanfaat. Tidak mungkin untuk menggeneralisasi tentang hasil antara dalam proses seperti yang Anda bisa tentang produk jadi.

Adapun tiga pilar dalam governance :



Gambar 1.1 Pilar dalam Collaborative Governance

1. Pemerintahan

Menurut pemerintah, pembangunan desa dan pengembangan kawasan desa wisata dimaksudkan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. menggunakan kebijakan program pembangunan desa yang terpusat atau suportif yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa yang memperhatikan kebutuhan dilakukan secara efisien dan efektif. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi kemampuan adat untuk menawarkan bantuan keuangan, seperti uang alokasi desa atau dana pembangunan. Melalui situs web pemerintah, dukung dan promosikan anggaran.

2. Swasta

Pariwisata swasta berfungsi sebagai platform bagi penduduk setempat untuk mencari kerajinan, UKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan menciptakan barang-barang industri produksi lokal yang memanfaatkan industri pariwisata dengan menawarkan fasilitas pariwisata.

3. Masyarakat

Dalam situasi ini, fungsi masyarakat adalah untuk dapat menjadi tuan rumah acara yang berhubungan dengan pariwisata sehingga terjadi interaksi yang damai antara pengunjung dan wisatawan. Masyarakat lokal dapat berkolaborasi dalam wisata budaya, mulai dari pengelolaan hingga pemasaran, guna menurunkan angka pengangguran dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata. melalui pengembangan bakat daerah, pendapatan asli daerah, potensi wisata, kesejahteraan, dan pemenuhan taraf hidup. Perekonomian masyarakat juga didorong oleh pengembangan industri pariwisata, yang juga meningkatkan kesadaran pariwisata dan membantu melindungi industri. Dengan menghasilkan sumber daya yang dipelihara dan ditingkatkan, serta dengan mengembangkan, mengelola atraksi, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan rencana yang ditetapkan sebelumnya, masyarakat lokal dapat memantau atau mengatur pariwisata. sumber dari negara berkembang serta yang ditingkatkan dan dilestarikan.

Menurut Ansell dan Gash (2012) model Collaborative governance memiliki empat variabel luas yaitu:

1. Keadaan awal

Setiap aktor memiliki masa lalu yang unik, yang mungkin menghasilkan hubungan asimetris dalam hubungan yang benar-benar tercapai, sesuai dengan pemahaman kondisi aslinya.

2. Desain institusi

Desain Kelembagaan, menurut Ansell dan Gash, mengacu pada pedoman dan konvensi mendasar untuk kerja sama kritis, dengan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi mendapat perhatian terbesar. Yang perlu digarisbawahi dalam proses kemitraan adalah pemerintah harus transparan dan inklusif.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan kolaboratif yang efektif terdiri dari tiga elemen, menurut Ansell dan Gash:

- a. Manajemen proses kemitraan yang tepat.
- b. Mengontrol kapasitas untuk melaksanakan kredibilitas teknis; c. Memastikan kerjasama dilengkapi untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipercaya dan meyakinkan untuk semua pemain.

4. Kerjasama

Model proses kolaboratif memandang pengembangan kolaborasi sebagai sebuah langkah. Proses kerjasama dibagi menjadi tiga bagian

oleh Gray, Ansell, dan Gash, meliputi identifikasi masalah (problem determinasi), identifikasi tujuan (goal Establishing), dan eksekusi.

Masing-masing variabel umum ini dapat dipilih untuk menjadi variabel yang lebih tepat. Model di atas memperlakukan variabel proses kolaboratif sebagai komponen utamanya, dengan keadaan awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan.

1.6.3 Desa Wisata

1. Desa wisata

Desa wisata adalah tempat dimana adat, budaya, dan kearifan lokal lainnya dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan potensinya dan ditampilkan untuk kepentingan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Desa wisata merupakan kawasan berupa lingkungan pedesaan yang memiliki daya tarik wisata berbasis kearifan lokal seperti adat istiadat, budaya, dan kekayaan alam yang memiliki keunikan dan keaslian berupa hubungan yang sudah terjalin sejak lama antara penduduk dengan lingkungannya. .

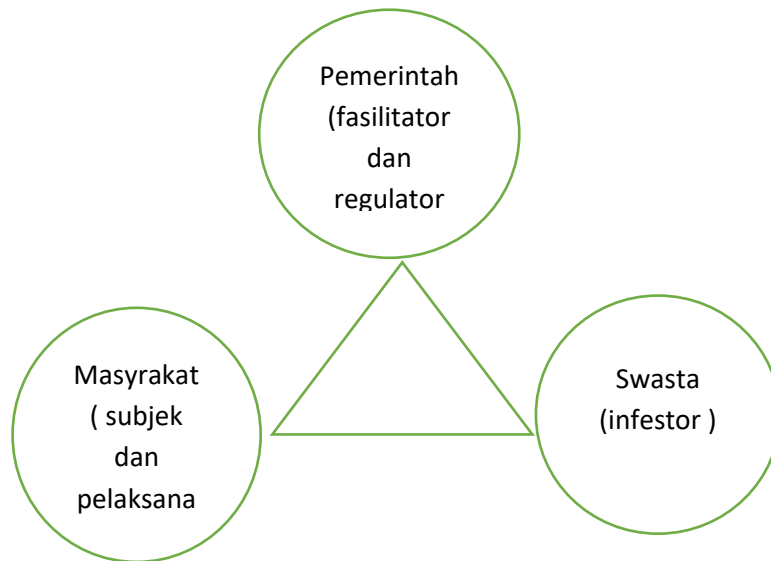
Kearifan lokal atau sistem pengetahuan lokal yang dimaksud di sini sebagai pengetahuan unik yang dimiliki oleh masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang sejak lama. Di daerah pedesaan yang dipertahankan sebagai desa wisata, seringkali terdapat beberapa atau campuran dari berbagai atraksi wisata.

Misalnya, Desa Wisata Edupark Kajar menggabungkan agrowisata, wisata budaya, dan ekowisata. Menurut I. Pitana (2009), pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata akan segera mempengaruhi dan melibatkan masyarakat lokal, baik dampak baik maupun dampak negatifnya.

2. Konsep Pengembangan Desa Wisata

Wisata desa adalah jenis perjalanan di mana sekelompok kecil pengunjung tinggal dalam suasana tradisional, biasanya di desa-desa terpencil, untuk belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan sekitarnya, menurut Edward Inskeep (1991: 166). Akibatnya, desa wisata memiliki beberapa fitur yang membuatnya menarik bagi pengunjung. Desa wisata menyediakan suasana pedesaan di samping kualitas uniknya yang tidak ada di kota. Menurut Nuryanti (1991:131), desa adalah suatu jenis daya tarik, penginapan, dan fasilitas pendukung yang ditampilkan dalam kerangka kehidupan komunal dan terjalin dengan praktik dan adat istiadat yang relevan. Menurut sudut pandang ini, desa wisata harus mencakup dua elemen kunci: (1) penginapan, yang sering disediakan oleh penduduk setempat; dan (2) atraksi yang meniru kehidupan desa sehari-hari dan melibatkan pengunjung sebagai peserta aktif, seperti kelas tari atau membatik (Nuryanti, 1991:131) Dengan mengusung gagasan wisata pemberdayaan masyarakat, desa wisata menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai aspek terpenting

keberhasilan mereka. Penelitian ini mencoba menggambarkan pertumbuhan komunitas wisata yang signifikan dari sudut pandang keterlibatan lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif.



Bagan 1.1 pemangku kepentingan Pengelolaan Desa wisata

1.7 Definisi Konseptual

. Pengertian konsepsi adalah batasan pengertian yang diberikan kepada variabel-variabel konsep, yang untuk itu studi harus dilakukan dan data harus dikumpulkan. Studi penelitian ini sendiri mencakup pemeriksaan sejumlah faktor konseptual.

1.8 Collaborative Governance

Untuk menjalankan kebijakan, menjalankan program, atau mengelola aset, tata kelola kolaboratif adalah seperangkat pedoman di mana satu atau lebih lembaga publik secara aktif mengintegrasikan pemangku kepentingan non-negara dalam

proses pembuatan kebijakan resmi. Semacam pariwisata yang disebut "desa" menggunakan ide konservasi.

1.9 Desa wisata

Merupakan suatu lingkungan atau kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata disebut desa wisata. Adat dan budaya kuno masih dipraktekkan di desa wisata. Kota wisata itu sendiri ada di samping banyak perusahaan pendukung termasuk sistem pertanian, berkebun, dan keahlian memasak tradisional.

1.10 Definisi Oprasional

Suatu sifat, sifat, atau nilai sesuatu atau kegiatan dengan perubahan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan selanjutnya disimpulkan itulah yang disebut sebagai variabel penelitian secara operasional. Sugiono (2008).

Table 1.2 Definisi oprasional menurut Ansell dan Gash.

No	Variable	Indicator	Parameter
1.	<i>Starting Condition</i> (Kondisi Awal	Relasi antar <i>stakeholder</i>	- menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2.	<i>Leadership</i> (kepemimpinan)	Kepemimpinan kolaboratif yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - manajemen cukup dalam kolaborasi -kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis - membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.
3.	Desain istitusional (<i>Institutional Design</i>)	legitimasi prosedural	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis.
4.	Proses Kolaborasi (<i>Collaborative Process</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>problem setting</i> - <i>direction setting</i> - <i>implementasi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dialog tatap muka(<i>Face to face</i>) b. Membangun kepercayaan (<i>Trust Building</i>)

			<p>c. Komitmen terhadap proses (<i>Commitment to process</i>)</p> <p>d. <i>Share Understanding</i></p> <p>e. Hasil Sementara</p>
--	--	--	--

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Jenis Penelitian

Penggunaan metode kualitatif digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini . Namun dalam pengertiannya sendiri penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln (2011: 3-4) dalam (Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, 2020) merupakan suatu upaya dalam melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan dengan yang diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian dalam penelitian ini akan mengungkap mengenai realita yang ada sesungguhnya, maka dari itu peneliti memilih pendekatan dengan studi kasus dalam penelitian yang dilakukan. Menurut (Creswell, 2014) pendekatan studi kasus menempatkan peneliti untuk mampu mengungkap dengan cermat mengenai suatu proses, peristiwa, kegiatan, aktivitas, ataupun program sebagai upaya dari penelitian yang dijalankannya. Digunakan metode kualitatif karena penelitiannya dapat

dilakukan secara lebih luas , serta dapat mengeksplor berbagai hal terutama focus pada penelitian sehingga dapat mendapatkan data secara detail dan lebih luas.

1.11.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu metode yang dilakukan dengan mensurvei dan menuliskan seluruh data yang ada dilapangan untuk mempermudah dalam hal penyampaiannya

1.11.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitiannya di Desa wisata Edupark Kajar Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, yang membuat peneliti memilih daerah Kajar sebagai tempat penelitian karena ini merupakan hal baru yang ada di Kabupaten Rembang dalam hal Collaborative Governance, dan juga lembaga Desa Kajar serta PT semen Gresik sangat kooperatif dalam memberi gambaran dan penjelasan mengenai pemaparan penelitian ini .

1.11.4 Jenis Data penelitian

a.) Data primer

Sugiyono (2016) mendefinisikan data primer sebagai informasi yang diberikan kepada pengumpul data atau peneliti langsung dari sumbernya. Sugiyono berpandangan bahwa wawancara dengan partisipan penelitian yang dilakukan melalui observasi tidak langsung atau langsung merupakan sumber data utama. mirip dengan bagaimana penulis melakukan penelitian ini. Wawancara

dengan kepala desa Kajar, pengelola desa wisata Edupark, dan pejabat dari PT. Semen Gresik menyediakan data primer.

b). Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber lain saat ini disebut sebagai data sekunder. Untuk mencegah penulis mengumpulkan data secara langsung dari hal yang diteliti. Data sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, arsip, dan sumber lainnya. Contoh jenis data sekunder antara lain data sensus penduduk, data penyakit, dan data pemerintah. Data sekunder sering digunakan untuk melengkapi data utama dalam penulisan penelitian.

1.11.5 Unit Analisis Data

Kepala desa Kajar, pengelola desa wisata, dan perwakilan dari PT. Semen Gresik adalah informan dalam penelitian ini yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi. Informan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan karena diyakini dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan lapangan pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut :

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak desa Kajar

yaitu Kepala Desa Kajar, dan juga Kepala pengelola desa wisata Edupark dan Perwakilan PT. Semen Gresik .dan pihak lain yang dianggap berfungsi sebagai informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna menyimpan informasi, dan digunakan sebagai bukti valid bahwasanya penelitian benar-benar dilakukan di Desa Kajar ,Dokumentasi sendiri berisi seperti Video, foto dan juga rekaman wawancara .adapun dokumentasinya yaitu laporan pengembangan Desa Wisata Edupark Kajar pada tahun 2020-2021 yang berhubungan dengan dokumen penting penelitian lain.

c. Observasi

Menurut Arifin (2011) Pengertian observasi adalah sebuah proses pengamatan dan pencatatan yang terstruktur secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi nyata atau tidak dengan tujuan tertentu. dan tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Edupark Kajar dalam mensejahterakan Masyarakat desa setempat.

1.11.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah ,pengumpulan data ,penggabungan data dan pengolahan data dan kemudian dipaparkan lalu mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut ,kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisis data kualitatif berikut ini sesuai untuk penelitian teknik arsitektur: (1) investigasi dampak modifikasi bentuk akibat perubahan lingkungan sosial budaya; (2) eksplorasi khazanah arsitektur baru; (3) analisis signifikansi fenomena perubahan dalam kaitannya dengan sosio-kultural yang mendasarinya; dan (4) penelitian yang membutuhkan penyelidikan menyeluruh.

1.11.8 Sistematika penelitian

Tujuan dari sistematika penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lengkap pada penulisan skripsi ,adapun sistematika penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 manfaat teoritis

1.4.2 manfaat praktis

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.5.1

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Collaborative governanve

1.6.2 Desa Wisata

1.7 Definisi Konseptual

1.8 Definisi Operasional

I.9 Metode penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

1. 9.2 Lokasi Penelitian

1.9 .3 Jenis Data Penelitian

1.9.4 Unit Analisis Data

1.9.5 Teknik Pengumpulan Dat

1.9.6 Teknik Analisis Data

BAB II Deskripsi Objek Penelitian

A. Profil Desa Gunem

B. Desa wisata kajar

BAB III Pembahasan

Berisikan tentang hasil penelitian dari jawaban pembangunan dan pengelolaan desa wisata edupark kajar kabupaten Rembang tahun 2020-2021

BAB IV Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran.